

**LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(MANDIRI)**



**PELATIHAN SKILL AKUNTANSI BAGI PENGELOLA BUMDES DI DESA
HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO**

OLEH :

USMAN, S.Pd., M.Si
NIDN: 00 24 06 77 02

**JURUSAN AKUNTANSI DAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN MANDIRI**

1. Judul Kegiatan : PELATIHAN SKILL AKUNTANSI BAGI PENGELOLA BUMDES DI DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
2. Lokasi : DESA HUANGOBOTU
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Usman, S.Pd., M.Si
 - b. NIP : 197706242008121002
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 d
 - d. Program Studi/Jurusan : S1 Akuntansi / Akuntansi
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085298116873
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : -
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : -
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : KEPALA DESA HUANGOBOTU
 - b. Penanggung Jawab : KEPALA Desa
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : DESA HUANGOBOTU KECAMATAN KABILA BONE KABUPATEN BONE BOLANGO
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 25
 - e. Bidang Kerja/Usaha : BUMDes
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : - bulan
7. Sumber Dana : Biaya Mandiri
8. Total Biaya : Rp. 2.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi




(Dr. Muhammad Amir Arham, M.E.)
NIP. 197207252006041002

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 196105261987031005

Gorontalo, 18 April 2022
Ketua



(Usman, S.Pd., M.Si)
NIP. 197706242008121002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
Abstrak.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi	1
1.2 Pemateri.....	3
1.3 Permasalahan Mitra.....	4
1.4 Tujuan Kegiatan	4
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
1.6 Pemecahan Masalah	5
BAB II.....	6
LANDASAN TEORI.....	6
2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	6
2.2 Laporan Keuangan yang Berkualitas	10
2.3 Manfaat Pelaporan Keuangan	12
BAB III	13
TARGET, LUARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN	13
3.1 Target	13
3.2 Luaran.....	14
3.3 Pelaksanaan Kegiatan.....	14
a. Prioritas Kegiatan	14
b.Keterlibatan Kelompok Mitra dalam Program	15
c.Rencana Evaluasi	16
DAFTAR PUSTAKA	20

Abstrak

Pelatihan dasar skill akuntansi bagi pengelola BUMDes di Desa Huangobotu di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu kegiatan untuk peningkatan sumber daya manusia dengan prinsip pengelolaan keuangan yaitu akuntabilitas dan transparan sehingga terwujud sistem administrasi yang tertib dan efisien. Salah satu indikatornya adalah tersusunnya catatan atas laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku secara umum yang dibuat oleh pengelola atau bendahara BUMDes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango untuk dapat memberikan pemahaman serta semangat pelayanan publik agar dapat membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik dimasa mendatang. Adapun yang menjadi metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah berupa penyuluhan kepada pengelola BUMDes, diskusi dan praktek yang sebelumnya didahului dengan pendekatan komunikasi kepada penanggung jawab di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan skill dasar akuntansi dari pengelola BUMDes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Namun ppengabdian ini perlu dilakukan pelatihan secara kontinu agar dapat diperoleh hasil yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Skill* Akuntansi, Badan Usaha Milik Desa

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Kabupaten Bone Bolango dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bonebolango di Provinsi Gorontalo. Kabupaten Bone Bolango terdiri dari 18 Kecamatan, yaitu:Kecamatan Tapa Kecamatan Bulango Utara Kecamatan Bulango Selatan Kecamatan Bulango Timur Kecamatan Bulango Ulu Kecamatan Kabila Kecamatan Botupingge, Kecamatan Tilongkabila, Kecamatan Suwawa, Kecamatan Suwawa Selatan, Kecamatan Suwawa Timur, Kecamatan Suwawa Tengah, Kecamatan Pinogu, Kecamatan Bonepantai, Kecamatan Kabila Bone, Kecamatan Bone Raya, Kecamatan Bone dan Kecamatan Bulawa.

Selanjutnya BUMDes di dirikan dengan tujuan sebagai motor pembangunan ekonomi tingkat desa. Pembangunan ekonomi pedesaan didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan modal yang dimiliki dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Adapun yang menjadi dasar Dasar pembentukan BUMDes sebagai penggerak pembangunan di desa lebih didasari pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. Abdul Rahman Suleman (2020) Membangun Indonesia yang diawali dari wilayah pinggiran dengan metode menguatkan daerah-daerah serta desa dalam kerangka Negeri Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu bagian 9 Program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga bisa menjadi pekerjaan besar bagi Kementerian Desa untuk dapat menjelaskan pentingnya BUMDes kepada seluruh desa di seluruh pelosok negeri. Dan di sisi lain Coristya Berlian Ramadana (2021) tantangan yang sangat besar bagi para kepala desa di seluruh nusantara untuk dapat memahami dan menjalankannya. Hasil penelitian ini

ialah keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa. Akan tetapi semua bidang usaha saat ini tidak berjalan dan tidak dapat menyokong pendapatan desa Sehingga dapat dikatakan eksistensi dari badan usaha milik desa ini hanya sebatas papan nama saja.

Hasil penelitian Susanto dkk (2020) yang dikutip oleh usman (2021) dinyatakan bahwa semakin ketatnya persaingan bisnis pada perusahaan menuntut perusahaan untuk dapat menyediakan informasi-informasi yang bisa digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi dalam berbagai bentuk dibutuhkan makin cepat, lengkap, dan sesuai dengan standar, antar lain informasi untuk mengambil keputusan adalah laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi informasi-informasi mengenai keuangan sebuah perusahaan yang diringkas dari transaksi-transaksi keuangan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk melihat atau menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan bertujuan untuk menghasilkan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Berkaitan hal itu Pengelolaan keuangan di BUMDes memiliki peran dan fungsi yang strategis, kredibilitas pemegang keuangan, kemampuan keilmuan SDM serta sistem administrasi keuangan akan sangat berpengaruh pada kesehatan manajemen kelurahan. Pencatatan keuangan dan pengelolaan data keuangan. Untuk itu diperlukan para pengelola keuangan khususnya

bendahara di tiap BUMDes Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango untuk memiliki skill akuntansi yang memadai.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar terjadi keseragaman, ketepatan dapat diperbandingkan, dan dapat dimengerti, serta tidak menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan. Hal lain penelitian yang dilakukan oleh Apriyanti dalam penelitian Susanto dkk (2020) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 5 pilar yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan - International Financial Report Standard (PSAK IFRS), Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik (SAK-ETAP), Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). PSAK IFRS diterapkan untuk entitas dengan akuntabilitas publik.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes tentang pengelolaan keuangan maka kami sebagai pengusul program pengabdian akan mengadakan pelatihan skill akuntansi pada pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo yang juga merupakan desa binaan dari universitas negeri gorontalo berdasarkan MOU yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Universitas Negeri Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

1.2 Pemateri

Pelaksanaan pengabdian kolaboratif ini dengan menampilkan 4 pemateri masing– masing adalah sebagai berikut :

1. Mattoasi, S.Pd.,SE.,M.Si.,Ph.D.
2. Doktor Tri handayani amaliah, SE.,Ak.,M.Si
3. Usman, S.Pd.,M.Si.
4. Victorson Taruh, SE.Ak, MSA

1.3 Permasalahan Mitra

- a. Masih minimnya keahlian pengurus dalam mengelola keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango
- b. Kurangnya Pemahaman Tentang penyusunan model laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan standar akuntansi keuangan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

1.4 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan kegiatan yang ingin dicapai adalah:

1. Peserta memahami skill dasar akuntansi mulai dari persamaan akuntansi hingga siklus akuntansi, mengingat tidak semua peserta (bendahara BUMDes) di kecamatan Kaboila Bone adalah lulusan akuntansi oleh sebab itu dengan pelatihan ini mereka mendapatkan dasar dalam pemahaman akuntansi
2. Mengetahui sistem pengelolaan keuangan BUMDes yang terfokus dalam pengelolaan dana yang bersumber dari APBD
3. Mengetahui tingkat keahlian pengurus dalam mengelola keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango
4. Mengetahui tingkat pemahaman pengurus dalam menyusun model laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Dapat mengetahui kondisi nyata pengelolaan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

5. Bagi pengurus BUMDes

Sebagai referensi untuk menyusun laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes) berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku secara umum di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango

6. Bagi Pengembangan Ilmu

Dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian dan pengabdian terkait tentang penyusunan laporan keuangan badan usaha milik desa (BUMDes)

1.6 Pemecahan Masalah

Memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes tentang keahlian, pengetahuan dan pengalaman untuk menyusun model laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan pada badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sehingga dengan kegiatan pelatihan ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pengurus BUMDes melalui materi-materi yang diberikan oleh nara sumber yang sudah cukup berpengalaman di bidang akuntansi. Pelatihan ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dalam mengelola keuangan BUMDes sehingga laporan keuangan yang disusun dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Pengurus BUMDes diharapkan dapat mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan yang diselenggarakan oleh pemerintah disetiap even tahunan sehingga pengelolaan keuangan BUMDes yang ada di Desa di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat disusun secara andal, akurat, transparan dan akuntabel.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Salah satu penggunaan dana desa sesuai dengan undang-undang No.6 tahun 2014 tentang desa adalah badan usaha milik desa (BUMDES). Dalam undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 butir 6 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa badan usaha milik desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dalam program alokasi dana desa, pemerintah mengeluarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 ini tidak ada perbedaan yang berarti dalam pengelolaan dana desa. masyarakat pedesaan. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa (Nurniah, Sukriah, 2019).

BUMDes bertujuan ' Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan fungsi BUMDes adalah: sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan

Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Amelia Sri Kusuma Dewi, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Ketut Putri Andayani (2021) dengan hasil studi menunjukkan bahwa tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDES untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa dibidang ekonomi telah berhasil. Hal tersebut diperkuat karena BUMDES merupakan salah satu motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk pengaturannya sendiri secara rinci ditemukan pada peraturan menteri, bukan didalam undang-undang yang mana peraturan menteri tersebut ialah peraturan pelaksana. Sehingga terdapat problematik normatif yakni norma kosong pada Undang-Undang, yang berimplikasi pada pelaksanaannya dilapangan. Demikian pula oleh Meyla Dwi Tantri (2019) menjelaskan bahwa dari empat tahap pengelolaan dana terdapat kelemahan transparansi pada tahap pelaporan dan tanggung jawab pada tahap administrasi. Ada salah saji antara laporan penggunaan sumber daya dan administrasi kegiatan.

UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 yang diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member base dan self help. Hal ini penting mengingat bahwa profesionalisme pengelolaan BUMDes benar-benar didasarkan pada kemauan (kesepakatan) masyarakat banyak (member base), serta kemampuan setiap anggota untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (self help), baik untuk kepentingan produksi (sebagai produsen) maupun konsumsi (sebagai

konsumen) harus dilakukan secara professional dan mandiri. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan (seperti harga lebih murah dan mudah mendapatkannya) serta menguntungkan. Dalam hal ini, BUMDes sebagai institusi Komersial, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sector riil dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM), Rahardjo dan Ludigdo (2006,h.84).

(Budiono (2015) menjelaskan salah satu cara untuk mendorong pembangunan di tingkat desa adalah pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa melalui lembaga-lembaga ekonomi di tingkat desa. Lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa menjadi dasar dalam pendirian BUMDes sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (PKDSP, 2007). BUMDes dalam pelaksanaan dan kepemilikan modal dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Hari Fitrianto (2016) Dengan hadirnya UU Desa sebagai spirit baru bagi BUMDes bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang vital ditingkat desa. Posisi strategis BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa sekaligus sebagai lembaga social yang bisa memberdayakan masyarakat desa, menjadikan BUMDes penting untuk dikaji, terlebih minimnya kajian yang serius menggali problematika seputar BUMDes secara spesifik. Penelitian ini berupaya untuk memotret BUMDes dan juga melakukan perbandingan dalam waktu yang bersamaan. Perbandingan antara BUMDes yang mampu bertahan dan berkembang dengan BUMDes yang kurang berkembang.

Sayuti (2011) mengemukakan bahwa keberadaan BUMDes diperlukan guna menggerakkan potensi desa serta dapat membantu dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hal tersebut juga didukung oleh Hardijono dkk (2014) bahwa pendirian BUMDes merupakan jalan untuk membentuk ekonomi pedesaan yang mandiri sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. BUMDes diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan perekonomian desa (Ramadana dkk, 2013). BUMDes telah memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian masyarakat khususnya dalam menghadapi Asean Economic Community 2015 (Alkadafi, 2014).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Afrijal (2016) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, bantuan pemerintah kabupaten/kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (id.wikipedia.org/wiki/pembukuan).

Afifa Rachmanda Filya (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes sudah berjalan baik namun masih belum optimal, dikarenakan belum terpenuhi beberapa indikator yaitu tenaga kerja, modal, pangsa pasar, akuntabel dan peningkatan laba/rugi. Saran yang diberikan peneliti yaitu: (1) Dilakukannya perbaikan dan peningkatan terhadap dimensi dan indikator yang belum terpenuhi, (2) Menarik minat masyarakat terhadap BUMDes dengan membuat acara dan (3) Pemerintah Desa melakukan pendampingan intensif terhadap BUMDes agar memacu pendapatan.

hal yang sama oleh Ni Kadek Diah Candra Kartika (2017) dalam hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Kerta Danu Mandara dilakukan secara tidak transparan dikarenakan pengelolaan dana hanya dilakukan oleh pengelola dan pendamping BUMDes Kerta Danu Mandara. Selain itu terdapat kendala dalam usaha dagang dan usaha Rumah Tangga Sasaran (RTS), namun dalam usaha kredit umum tidak terdapat suatu kendala. Hal ini menyebabkan pengelolaan dana yang terjadi pada BUMDes Kerta Danu Mandara hanya memenuhi 81% kategori, dan termasuk ke dalam kriteria cukup efektif.

2.2 Laporan Keuangan yang Berkualitas

Dalam artikel yang ditulis oleh erni (2019) yang dipublikasikan dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id> dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban keuangan yang berkualitas tentunya sangat diharapkan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karenanya, perlu untuk menerjemahkan apa yang menjadi kriteria laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat 4 (empat) kriteria atau prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Keempat kriteria tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Karakteristik Informasi yang relevan dalam Laporan Keuangan, apabila memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) yang memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu, memiliki manfaat prediktif (*predictive value*) yang dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini, dan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan,

serta lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Selanjutnya laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Karakteristik Informasi yang andal, apabila penyajian jujur, dapat diverifikasi (*verifiability*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh berbeda, netralitas yang diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Sementara kriteria dapat dibandingkan yaitu apabila laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan laporan keuangan entitas pelaporan lainnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal, perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, Sedangkan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Kriteria terakhir, dapat dipahami yaitu apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Hasil penelitian berdasarkan Neraca dan Laporan Laba Rugi tahun 2011 dan 2012, menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Penelitian ini menyarankan agar

perusahaan menyusun komponen laporan keuangan lainnya dan mengungkapkan kebijakan akuntansi perusahaan dalam CALK. (Pratiwi, 2014)

2.3 Manfaat Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah memiliki manfaat sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, serta sarana evaluasi kinerja. Sebagai media transparansi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di era sekarang, pemerintah dituntut untuk melakukan transparansi dalam hal aktivitas pengelolaan sumber daya publik, penyusunan rencana, dan pelaksanaan program pemerintah. Sebagai media akuntabilitas publik, laporan keuangan pemerintah berguna untuk mempertanggungjawabkan penggunaan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan publik kepada pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, serta hak untuk didengar aspirasinya. Sebagai sarana informasi, laporan keuangan pemerintah berguna untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah, menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi pemerintah dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, memonitor kinerja, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai sarana evaluasi kinerja, laporan keuangan pemerintah berguna untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan diantaranya berupa: (1) menentukan biaya program, fungsi, dan aktivitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit yang lain; (2) mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas operasi, program, aktivitas, dan fungsi tertentu di dalam pemerintahan; (3) mengevaluasi hasil (*outcome*) suatu program, aktivitas, dan fungsi serta efektivitas terhadap pencapaian tujuan dan target; (4) mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan. <https://djpb.kemenkeu.go.id>.

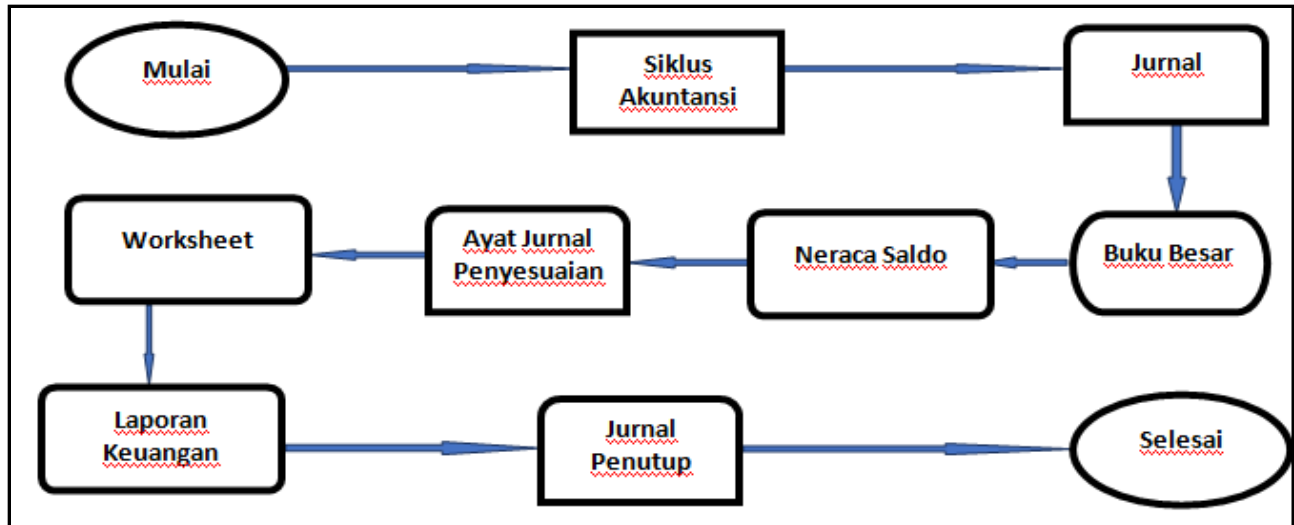
BAB III

TARGET, LUARAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Target

Kegiatan pelatihan tentang pengelolaan keuangan BUMDes di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango setidaknya memiliki target berupa terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango. Pelatihan ini juga diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan BUMDes di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dapat terukur relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami oleh seluruh pengguna yang berkepentingan.

Sedangkan gambaran Iptek yang akan diperoleh dari pelatihan akuntansi adalah sebagai berikut:



3.2 Luaran

Sedangkan luaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini tentang pengelolaan keuangan BUMDes berdasarkan PSAK sebagai berikut::

1. Kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini memberikan ilmu kepada pengurus BUMDes di kecamatan kabila bone kabupaten bone bolango tentang pengelolaan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku umum
2. Bertambahnya pengetahuan pengurus BUMDes di di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango tentang pengelolaan keuangan berdasarkan SAK yang berlaku umum

3.3 Pelaksanaan Kegiatan

a. Prioritas Kegiatan

Kondisi Covid -19 saat ini memaksa pemerintah untuk menerapkan social distancing pada masyarakat untuk meminimalisir penyebaran Virus Corona diberbagai daerah di indonesia. Oleh karena itu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan untuk memenuhi tri darma perguruan tinggi adalah pelatihan skiil akuntansi keuangan berdasarkan PSAK pada pengurus keuangan BUMDes yang ada di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango,

dengan pelatihan ini dapat meningkatkan pengetahuan pengelola keuangan BUMDes khususnya bendahara tentang model laporan keuangan berdasarkan PSAK –IFRS

b. Keterlibatan Kelompok Mitra dalam Program

Dalam rangka menyukseskan kegiatan pelatihan ini kami berharap kepada kelompok mitra agar kirannya dapat terlibat langsung dan bekerja sama dalam hal melaksanakan kegiatan ini, agar tujuan yang diharapkan bersama dapat terwujud. Dengan harapan dan partisipasi mereka yang diperlihatkan oleh mitra ini menjadi kesan tersendiri bagi kami selaku pelaksana di dalam melakukan kerjasama – kerjasama di masa–masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keahlian akuntansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes untuk mewujudkan transparan dan akuntabel.

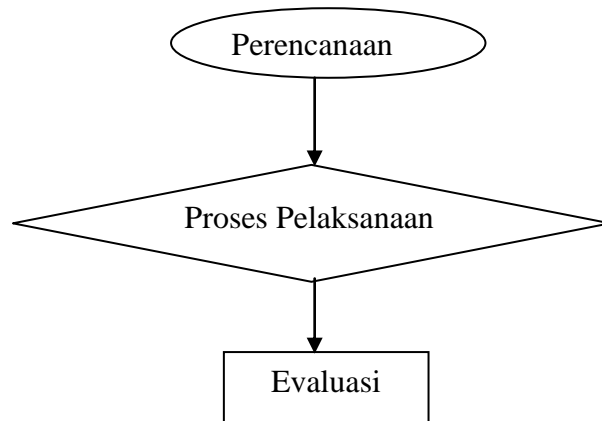
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pengelolaan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango melibatkan pemerintah, masyarakat pedesaan dan LPM UNG. Pengurus pengelolaan keuangan usaha BUMDes yang ada di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, sedangkan LPM UNG akan membantu dalam sumber daya manusia khususnya kepakaran dan keahlian dalam teori. Kemitraan ini dilakukan atas dasar saling menguntungkan kedua belah pihak yakni pengurus usaha BUMDes yang ada di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango.

Kegiatan ini dapat terlaksana untuk menjaga kemitraan antara UNG dengan masyarakat sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi. Khususnya darma pengabdian kepada masyarakat bagi khalayak sasaran, pengurus usaha BUMDes di Desa Botubarani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya akan mendatangkan banyak manfaat dan keuntungan berupa peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi manajemen.

c. Rencana Evaluasi

Evaluasi pada awal kegiatan dilakukan dalam tiga tahap yakni; Mulai dari perencanaan, Proses pelaksanaan dan Evaluasi seperti gambar berikut:

:



Gambar 3.1

Evaluasi pada awal kegiatan dilakukan untuk menetapkan rencana kegiatan yang akan dilakukan evaluasi proses pelaksanaan dilakukan untuk mengetahui keterlaksanaan program. Sementara evaluasi pada akhir kegiatan dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan dari keseluruhan program kegiatan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini merupakan bagian umum lokasi dan data yang diperoleh selama pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan penjelasan secara Luring (offline) dalam bentuk Pelatihan Skill Akuntansi Bagi Pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sifatnya normatif dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan pengelola BUMDes dapat memiliki skill yang lebih baik dalam menyusun laporan keuangan yang dapat diandalkan sehingga usaha BUMDes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone dapat berjalan dengan baik.

4.1 Gambaran Umum lokasi Pelaksanaan

Badan Usaha milik Desa (BUMDes) Huangobotu merupakan salah satu badan usaha milik desa yang sampai saat ini belum mengalami perkembangan kearah mensejahterakan masyarakat dan pengelolaan keuangan. BUMDes Desa Huangobotu terletak di Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Desa Huangobotu memiliki jumlah penduduk 1361 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 443. Pengelolaan keuangan BUMDes masih dicatat secara sederhana dan hanya dalam bentuk kuintansi yang belum dibukukan sampai penyusunan laporan keuangan karena sumber daya manusia yang dimiliki masih rendah dan rata-rata pengelola BUMDes masih berpendidikan SMA sederajat. Dengan adanya permasalahan tersebut tentu dapat diatasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada

pengelola BUMDes untuk dapat mengikuti praktek pelatihan keterampilan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku secara umum.

Dengan adanya pelatihan ini tentang pengelolaan keuangan khususnya skill akuntansi terhadap pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes Huangobotu kecamatan Kabila Bone maka peserta mampu memahami mekanisme pencatatan, pengelolaan dan penatausahaan keuangan BUMDes. dengan pengelolaan keuangan yang baik maka sangat memudahkan pengurus atau pengelola BUMDes untuk membuat perencanaan tentang usaha BUMDes serta teknik pengawasan terhadap lembaga BUMDes.

4.2 Peserta Pelatihan

Pelatihan ini diikuti 15 orang peserta masing-masing 10 dari pengelola BUMDes dan 5 dari kalangan masyarakat, pelatihan ini dilakukan agar pengelola BUMDes dan usaha produktif lainnya yang ada pada masyarakat Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat dikelola dengan baik terutama dalam pengelolaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes agar dapat lebih efektif dan efisien terhadap penggunaan keuangan dalam menjalankan usaha secara produktif

4.3. Capaian Hasil Pelaksanaan

Berdasarkan hasil survey tentang pelatihan skill akuntansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes yang dilaksanakan secara langsung di lapangan Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango tanggal 31 april 2022 maka peserta lebih memahami penjelasan dan petunjuk- petunjuk riil lapangan yang disampaikan oleh nara sumber atau pemateri dalam mengembangkan usaha milik Desa atau BUMDes melalui pelatihan skill akuntansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes untuk mendapatkan profit yang lebih baik. Dengan adanya bentuk sosialisasi tersebut tentang pelatihan skill akuntansi

terhadap pengelolaan keuangan BUMDes maka pengelola BUMDes dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan produktivitas serta dapat mengembangkan inovasi, kreatifitas maupun kualitas usaha yang dimilikinya yang dapat memberikan nilai jual dan nilai saing untuk meningkatkan usahanya

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Seluruh pengelola atau pengurus BUMDes ikut serta pelatihan ini karena semua pengurus BUMDes wajib mengetahui keuangan yang dimiliki oleh BUMDes. Seluruh peserta yang ikut dalam pelatihan skill akuntansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes dapat mengetahui dan memahami tentang cara mengelola keuangan BUMDes yang sesuai dengan standar pengelolaan keuangan yang berlaku umum, menciptakan, dan mendesain usahanya secara kreatif atau sekitar 85% dapat mengerti dari penjelasan-penjelasan secara tutorial dari nara sumber untuk pengelolaan keuangan BUMDes dalam menentukan profit yang lebih baik.

Hasil kegiatan tentang Pelatihan Skill Akuntansi Bagi Pengelola Bumdes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango sangat bermanfaat bagi pengelola BUMDes untuk mencatat transaksi sampai pelaporan keuangan seperti laporan arus kas yang terdiri dari penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, pendanaan selama satu periode. Pengelolaan usaha milik desa sangat penting dikelola oleh sumber daya manusia yang memahami pengelolaan keuangan dengan baik untuk meningkatkan usaha dan pendapatan masyarakat desa. dan khususnya dalam pengelolaan keuangan dengan memperhatikan aliran kas masuk dan kas keluar maka sangat

dimungkinkan untuk membuat prediksi yang lebih baik atas jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas di masa depan.

5.2 Saran

Mengingat Pelatihan tentang Skill Akuntansi bagi Pengelola BUMDes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango yang dilaksanakan secara Luring (Luar Jaringan) tentang bagaimana pelaku BUMDes dapat mengetahui gambaran mengenai seberapa jauh perusahaan tersebut berkembang serta seberapa banyak kas yang mampu dihasilkannya maka disarankan kepada Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango dapat menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar-seminar, pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh beberapa instansi-intansi pemerintahan maupaun dari lembaga-lembaga perguruan tinggi yang dilaksanak setiap tahun agar dapat lebih produktif sehingga usaha yang degeluti dapat lebih menguntungkan dan dapat memberikan kesejahteraan dan juga dapat mengurangi pengangguran pada masyarakat di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrijal¹ , Ramadhani² (2016) Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* Vol. 5 No. 1
- Afifa Rachmanda Filya (2018) Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pades Di Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro). *Je & Kp* Vol. 5, No. 1/ Juni 2018: 19 – 39
- Amelia Sri Kusuma Dewi (2014) Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan asli desa (pades) serta menumbuhkan perekonomian desa. *Journal of rural and development*|volume v no. 1 februari 2014

- Alkadafi, 2014 Penguatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan kelembagaan badan usaha milik desa menuju asean economic community 2015. *jurnal el-riyasah* vol 5, no 1
- Arianti, Edy Yusuf Agunggunanto Fitrië, Edi Wibowo Kushartono Darwanto. 2016. Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Vol. 13 No. 1 Maret 2016
- Hari Fitrianto (2016) Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, Vol. 8, No. 2. Juli-Desember 2016
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). Standar Akuntansi Keuangan ETAP. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan RI, Laporan keuangan yang harus dibuat oleh pengelola BUMDes yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Retrieved from <https://klc.kemenkeu.go.id/pusknpk-laporan-keuangan-bumdes>
- Ketut Putri Andayani (2021) Pembentukan dan pengelolaan badan usaha milik desa (bumdes) sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat desa. *jurnal kertha negara* vol. 9 no. 5 tahun 2021, hlm.366-377
- Laporan Keuangan Pemerintah Seagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara. <https://djp.kemenkeu.go.id>. Diakses pada tanggal 3/06/2021
- Meyla Dwi Tantri (2019) Pengelolaan Dana BUMDes Bersama “Utama”: Kajian Aspek Transparansi dan Responsibilitas. *Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi* Volume XIII, No.1 (April 2019): 1-17
- Ni Kadek Diah Candra Kartika (2017) EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA PADA BADAN USAHA MILIK DESA KERTA DANU MANDARA DI DESA SONGAN A. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- Nurniah, Sukriah dan Istiyana (2019). Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan. prosiding Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 (pp. 389-394
- Ramadana, Coristya Berlian, HeruRibawanto, Suwondo, Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076.

Rahardjo dan Ludigdo. 2006. "BUMDes sebagai institusi Komersil, tetap memperhatikan efisiensi serta efektifitas dalam kegiatan sektor rill dan lembaga keuangan (berlaku sebagai LKM)". Malang Fakultas Administrasi Publik

Sayuti (2011) Pelembagaan badan usaha milik desa (bumds) sebagai penggerak potensi ekonomi desa dalam upaya pengentasan kemiskinan dikabupaten donggala. Jurnal academica fisip untad vol.03 no. 02 oktober 2011

Suleman, AbdulRahman, dkk (2020). .BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa. Yayasan Kita Peduli.

Pratiwi, A. A., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2014). Analisis Penerapan SAK ETAP pada Penyajian Laporan Keuangan PT Nichindo Manado Suisan. Jurnal EMBA, 2(3), 254-265

Link pengabdian (2022) https://youtu.be/kEtVio2p_t0

Lampiran-Lampiran

I. CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri:

Nama : Usman
 Tempat/ Tanggal Lahir : Pammase, 24 Juni 1977
 NIP : 19770624 200812 1 002
 NIDN : 0024067702
 Pangkat/ Golongan : Lektor III d
 Unit Kerja : Universitas Negeri Gorontalo
 Agama : Islam
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Status kawain : Kawin
 Nomor Telp/email : 065298116873
 Alamat tempat tinggal: Perum Tomulabutao Blok A/176 Kota Gorontalo

B. Riwayat Pendidikan Umum

No	Jenis Pendidikan	Nama Sekolah/Universitas	Jurusan/Program Studi	Tahun Lulus
	S-1	IKIP Negeri Gorontalo	Pendidikan Ekonomi Akuntansi	2002
	S-2	FE - UNPAD Bandung	Akuntansi/ilmu ekonomi	2005

S-3	FEB- UNPAD Bandung	DIA	Proses
-----	--------------------	-----	--------

C. Pengalaman Mengajar

No	Tahun	Mata Kulia	Jurusan	Tahun
1	2009-2020	- Akuntansi keperilakuan - Auditing - Akuntansi Perbankan - Sistem Informasi Akuntansi - Audit Internal - Komputer akuntansi	Jurusan Kuntansi Fakultas ekonomi Universitas Negeri gorontalo	2009-2020

D. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitaian	Sumber	Jumlah (Rp)
1	2020	Analisis pengelolaan arus kas untuk mengukur kinerja keuangan (suatu penelitian pada UMKM kota Gorontalo)	Mandiri	-
2	2021	Pengelolaan Pariwisata Bahari Dengan Pendekatan Model <i>Community Based Tourism</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pada Obyek Wisata Di Kabupaten Bonebolango -	PNBP	Rp.25.000.000
3	2022	Model Pengembangan Pariwisata Berbasis <i>Community Based Tourism</i> Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir Pantai Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango	PNBP	15.000.000

E. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian pada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2019	Penentuan harga pokok produksi berdasarkan harga pokok pesanan pada ud. Mandiri meubel di desa dutohe kabupaten bone bolango provinsi gorontalo	Mandiri	-
2	2020	Sosialisasi Pengelolaan Cash Flow Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Gorontalo,	Mandiri	-
3	2020	Sosialisasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi Covid -19 di Desa Biluango Kec. Kabilabone Kab. Bone Bolango.	Mandiri	-
4	2020	Pelatihan pengolahan kelapa menjadi minyak murni (VCO) untuk meningkatkan penghasilan	PNBP	25.000.000

		masyarakat di masa pandemi <i>covid-19</i>		
5	2021	Pendampingan Dan Pelatihan Pengolahan Ikan Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19	PNBP	12.500.000
6	2022	Pelatihan Skill Akuntansi Bagi Pengelola Bumdes di Desa Huangobotu Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango	Mandiri	-

F. Pengalaman penulisan Jurnal

No	Judul Penelitaian	Nama Jurnal	Bulan/Tahun
1	Pengaruh Pengalaman dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Internal	Al-buhutz	Volume 15 Nomor 2, 2019
2	Effect Of Independence And Competence The Quality Of Internal Audit: Proposing A Research Framework	IJSTR	FEBRUARY 2016
3	Effect Of Experience And Accountability On The Quality Of Internal Audit	IJSTR	MARCH 2016
	Influence of Whistleblowing Systems, Effectiveness of Intenal Audits and Good Government Governance on Fraud Prevention	IJISRT	21 NOV-2021

Dokumen Kegiatan

